**SKRIPSI**

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM MENCEGAH KEGIATAN TANPA IZIN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL**

****

**DISUSUN OLEH:**

**ACHMAD RESALH FIKRI**

**1900024071**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2023**

**THESIS**

**THE ROLE OF THE CENTRAL BANGKA DSTRICT ENVIRONMENT OFFICE IN PREVENTING UNAUTHORIZED ACTIVITIES IN THE BUKIT MANGKOL BOTANICAL FOREST PARK AREA**

****

**Written by :**

**ACHMAD RESALH FIKRI**

**1900024071**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements**

**to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2023**

# 

# HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM MENCEGAH KEGIATAN TANPA IZIN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL**

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

**Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.**

**NIPM: 197905212004050885094**

**APPROVAL PAGE**

**THE ROLE OF THE CENTRAL BANGKA DSTRICT ENVIRONMENT OFFICE IN PREVENTING UNAUTHORIZED ACTIVITIES IN THE BUKIT MANGKOL BOTANICAL FOREST PARK AREA**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of The Requirements to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies at Faculty of Law of**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

**Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.**

**NIPM: 197905212004050885094**

# HALAMAN PENGESAHAN

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan untuk Melengkapi Persyaratan**

**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Tanggal:**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

Anggota Penguji :

Anggota Penguji :

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

**APPROVAL PAGE**

**Accepted by the Examiner Board of Faculty of Law of**

**Universitas Ahmad Dahlan to Be Submitted As**

**A Fullfillment Of The Requirements to**

**Attain Bachelor Degree of Law**

**At the date:**

**THE EXAMINER BOARD**

Chairman : Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H. …………………..

Examiner I : . ………………….

Examiner II : ……………………

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

# PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Resalh Fikri

NIM : 1900024071

Email : achmad1900024071@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Tugas Akhir : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, Agustus 2023

Achmad Resalh Fikri

# PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Resalh Fikri

NIM : 1900024071

Email : achmad1900024071@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Tugas Akhir : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Agustus 2023

Achmad Resalh Fikri

Mengetahui,

Pembimbing

Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H.

NIPM: 197905212004050885094

# HALAMAN MOTTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa terselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya “

(Q.S Al- Baqarah: 286 )

Jika kita menyerah pada kegagalan sekarang maka kita tidak akan berhasil nantinya.

( Mario Teguh )

Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena orang lain juga manusia.

( Achmad Resalh Fikri)

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi-Nya atas rahmat dan karunia-Nya. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua yang paling berjasa dalam hidup saya yaitu Ibu Herlina dan Bapak Aswandi. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, kasih sayang, do’a, motivasi, semangat, dan nasehat serta candaan-candaan yang sering dilontarkan tiada hentinya diberikan kepada anaknya. Terima kasih juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *Aamiin.*
2. Adik-adik saya yang bernama Achmad Subhan Ramadhan, Achmad Haqqi Laskari, Achmad Quthus Matta, yang selalu menghibur saya melalui candaan ketika saya lelah dalam mengerjakan skripsi. Kalian sangat berarti bagi saya.
3. Keluarga besar saya baik itu dari keluarga Bapak dan Ibu. Terima kasih telah memberikan dukungan, arahan, dan nasehat.

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil’alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjunga kita Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nanti syafa’atnya di yaumil akhir kelak. Adapun judul skripsi ini adalah “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol”.

Penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi Penulis dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dan secara khusus kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, yang dapat digunakan sebagai sumber referensi maupun pertimbangan kedepannya dalam mencegah kegiatan tanpa izin yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Selesainya skripsi ini tidak lepasa dari peran serta dukungan banyak pihak, pada kesempatan ini dengan hormat Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas dukungan dan motivasi ilmu beliau kepada Penulis agar tekun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala bentuk pembelajaran dan pengajaran beliau berupa ilmu yang bermanfaat kepada Penulis agar menjadi mahasiswa yang tangguh dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai mahasiswa hukum.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bentuk ilmu dan dukungan serta motivasi ilmu yang diberikan beliau dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala bentuk ilmu dan dukungan serta motivasi ilmu yang diberikan beliau kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas ilmu dan dukungan serta nasehat beliau kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Anom wahyu Asmorojati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis atas segala ilmu, arahan dan masukan beliau kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan dengan baik.
7. Segenap ibu/bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa-mahasiswinya.
8. Seluruh staff administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan layanan administrasi kemahasiswaan selama menempuh perkuliahan.
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih banyk kepada dinas tersebut, karena telah berkenan membantu Penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan.
10. Kedua orangtua yaitu Ibu Herlina dan Bapak Aswandi serta adik-adik saya Achmad Subhan Ramadhan, Achmad Haqqi Laskari, Achmad Quthus Matta dan segenap keluarga besar yang telah memberikan doa’a dan dukungannya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan program studi yang ditempuh.
11. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis.

Akhir kata, skripsi ini telah dikerjakan Penulis dengan sebaik mungkin secara ilmiah dan sistematis, namun Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu Penulis mohon maaf atas segala kekeliuran dan kesalahan yang ada serta masukan berupa saran dan kritikan yang membangun guna tercapai kemanfaatan bagi banyak pihak.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

[HALAMAN PERSETUJUAN i](#_Toc142237239)

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc142237240)

[PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT v](#_Toc142237241)

[PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES vi](#_Toc142237242)

[HALAMAN MOTTO vii](#_Toc142237243)

[HALAMAN PERSEMBAHAN viii](#_Toc142237244)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc142237245)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc142237246)

[ABSTRAK xiv](#_Toc142237247)

BAB I [PENDAHULUAN 1](#_Toc142237249)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc142237250)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc142237251)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc142237252)

[D. Manfaat Penelitian 9](#_Toc142237253)

[E. Metode Penelitian 10](#_Toc142237254)

BAB II [TINJAUAN PUSTAKA 17](#_Toc142237256)

[A. Penelitian Terdahulu 17](#_Toc142237257)

[B. Kerangka Konseptual 25](#_Toc142237258)

[1. Batasan Istilah 25](#_Toc142237259)

[2. Kerangka Teori 33](#_Toc142237260)

BAB III [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45](#_Toc142237262)

[A. Gambaran Umum Tempat Lokasi Penelitian 45](#_Toc142237263)

[B. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah Dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol…………………………………………………………………..49](#_Toc142237264)

[C. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah Dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol 67](#_Toc142237265)

BAB IV [PENUTUP 78](#_Toc142237267)

[A. Kesimpulan 78](#_Toc142237268)

[B. Saran 78](#_Toc142237269)

[DAFTAR PUSTAKA 81](#_Toc142237270)

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM MENCEGAH KEGIATAN TANPA IZIN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL**

*Achmad Resalh Fikri*

# ABSTRAK

Sebagaimana amanat dari Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya. Tahura Bukit Mangkol dalam keberlangsungannya masih banyak sekali kegiatan tanpa izin yang terjadi yakni dari tahun 2017-2021. Dinas Lingkungan Hidup dalam peranannya sebagai pemangku kawasan dari Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dalam mencegah kegiatan tanpa izin yang terjadi masih terdapat banyak kekurangan dan problematika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan dan kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin yang terjadi di Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama berupa observasi dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Data Penelitian dianalisis secara kualitatif untuk dideskripsikan menjadi lebih konkrit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin di Taman Hutan Raya Buki Mangkol adalah dengan melaksanakan kegiatan yang bernama kegiatan pengamanan hutan yang didalamnya terdiri dari patroli rutin, menerima pengaduan dari masyarakat atas kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol, mendata pengguna kawasan yang menempati Tahura Bukit Mangkol, sosialisasi kepada masyarakat. Adanya kegiatan tersebut merupakan bentuk peranan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sebagai pemangku kawasan. Sekaligus kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin yakni terdiri dari masyarakat belum mengetahui fungsi dari Tahura, sarana prasarana dalam pengamanan belum optimal, tidak terdapat polisi hutan, belum memiliki kantor atau pos pengelolaan Tahura yang berada di kawasan Tahura.

**Kata Kunci:** *Taman Hutan Raya, Kegiatan Tanpa Izin, Peranan*

**THE ROLE OF THE CENTRAL BANGKA DSTRICT ENVIRONMENT OFFICE IN PREVENTING UNAUTHORIZED ACTIVITIES IN THE BUKIT MANGKOL BOTANICAL FOREST PARK AREA**

*Achmad Resalh Fikri*

**ABSTRACT**

As mandated by Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the government has an obligation to realize a good and healthy environment for its citizens. Tahura Bukit Mangkol in its sustainability there are still many unauthorized activities that occur, namely from 2017-2021. The Environmental Service in its role as an area holder of the Bukit Mangkol Grand Forest Park in preventing unlicensed activities that occur there are still many shortcomings and problems. The purpose of this research is to find out the role and constraints of the Central Bangka Regency Environmental Service in preventing unlicensed activities that occur in the Bukit Mangkol Botanical Forest Park.

This type of research is empirical juridical using primary data as the main data source in the form of observation by conducting observations and interviews. In addition, this research also uses secondary data as a supporting data source. The data collection method is carried out by searching for literature studies and field studies through observation and interviews. Research data is analyzed qualitatively to be described to be more concrete.

The results showed that the role of the Central Bangka Regency Environmental Service in preventing unauthorized activities in the Buki Mangkol Grand Forest Park is by carrying out activities called forest security activities which consist of routine patrols, receiving complaints from the public on unauthorized activities in Tahura Bukit Mangkol, recording area users who occupy Tahura Bukit Mangkol, socialization to the community. The existence of these activities is a form of the role of the Central Bangka Regency Environmental Service as an area holder. At the same time, the obstacles faced by the Central Bangka Regency Environment Agency in preventing unauthorized activities consist of the community not knowing the function of Tahura, the infrastructure in security is not optimal, there are no forest rangers, and there is no Tahura management office or post located in the Tahura area.

**Keywords:** *Botanical Forest Park, Unauthorized Activites, Role*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.* Mencermati isi dari pasal tersebut bahwa negara hukum ialah negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam instrumen dan aspek-aspek peraturan yang bersifat mutlak, memaksa, serta apabila hukum itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Aturan menjadi bahan dasar bagi negara yang ingin kuat dan maju serta dengan adanya aturan yang menjadi pilar, maka aturan tersebut akan membatasi segala bentuk kewenangan-kewenangan sehingga terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia juga merupakan negara yang kaya, diantaranya ialah kaya akan sumberdaya alamnya yang sangat begitu melimpah meliputi udara, laut, maupun darat. Sekitar 10% Semua jenis baik itu hewan dan tumbuhan hidup dan berkembang di negara Indonesia (Susanto, 2021: 1). Segala sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia dapat kita gunakan kepentingan bersama ataupun individu (Griselda C.H, 2019 : 1).

Mencermati Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”

Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak-hak setiap orang dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia oleh karena itu perlu adanya tata kelola, dan perlindungan dalam lingkungan hidup agar warga dapat menikmati hidupnya dengan nyaman.

Maksud dari Pasal 28 H ayat (1) ditegaskan lagi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Mencermati isi dari undang-undang tersebut bahwa, lingkungan hidup merupakan suatu alam yang di dalamnya terdapat berbagai macam keadaan dan kehidupan yang mempengaruhi alam itu sendiri, baik itu dari manusia, hewan dan tumbuhan (Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, 2021: 3).

Soemarwoto juga mengemukakan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang didalamnya ditempati oleh makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup disini ialah manusia, tumbuhan dan hewan. Tidak hanya makhluk hidup, benda mati juga menempati ruang tersebut, seperti udara, air, batu dan tanah. Tempat yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda mati dinamakan oleh Soemarwoto sebagai lingkungan hidup (Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, 2021: 4). Terkait prosesnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwasanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ialah suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terpadu dan tersusun secara sistematis yang kemudian bertujuan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup itu serta mencegah dampak-dampak negatif yang dapat merusak lingkungan hidup seperti; pencemaran, perusakan dan pemanfaatan yang tidak tepat sasaran (Herlina Nina, 2015: 2).

Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup serta menjadi salah satu paru-paru negara dan juga hutan menjadi salah satu sumber daya alam terbesar di Indonesia. Berbagai pulau besar yang ada di Indonesia seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan tersebar hutan yang sangat begitu luas (Griselda C.H, 2019 : 1).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mendefinisikan bahwa hutan berbunyi:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”

Hutan seringkali dapat kita temui pada daerah tropis dan daerah yang beriklim dingin karena kandungan-kandungan yang terkandung disana baik itu tanah,udara, dan iklim sangat mendukung kehidupan pohon di hutan tersebut. Hutan terdiri dari keanekaragamannya sehingga hutan dapat dikelompokan ke dalam beberapa jenis fungsinya diantara lain ialah, Hutan Produksi, Hutan Konservasi dan Hutan Lindung hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, 2011: 18-19).

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa Salah satu kawasan hutan yang dilindungi dan merupakan kawasan pelestarian alam ialah taman hutan raya dan seluruh ekosistem-ekosistem di dalamnya baik itu tumbuhan dan hewan. Ekosistem yang ada pada tahura terdiri dari alami dan buatan serta hewan yang ada pada tahura juga terdiri dari hewan yang memang benar asli dari daerah tersebut dan ada juga yang tidak. Suatu wilayah dikatakan layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Raya maka harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria dan hal ini tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berbunyi:

“Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

1. memiliki keindahan dan atau gejala alam,
2. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan atau satwa dan
3. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah”

Tahura termasuk hutan yang ekosistemnya sangat dilindungi namun tidak menutup kemungkinan bahwa hutan tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan seperti : tempat rekreasi dan pariwisata . Hal tersebut tidak lepas dari resiko dan dampak negatif yang akan mempengaruhi tahura tersebut jika tahura di jadikan sebagai tempat rekreasi sehingga harus ada pihak pengelola yang mengurus tahura agar tahura dapat terjaga dengan baik. (Barik, 2022 : 1-2).

Provinsi Bangka Belitung menjadi daerah yang kaya akan potensi sumber daya alamnya. Saat ini Provinsi Bangka Belitung memiliki tujuh kabupaten dan satu kota, salah satunya adalah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah yang memiliki banyak sekali potensi alam yang kemudian dapat dijadikan sebagai ekowisata yang cukup bagus. Salah satunya yakni Kawasan Tahura Bukit Mangkol yang terletak di Kecamatan Simpang Katis, Desa Terak (Veggy Shintya Putri & Ibrahim dkk, 2021 : 3). Tahura Bukit Mangkol merupakan Tahura yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2016 dalam Surat ketetapan Nomor SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016.

Dinas lingkungan hidup ditunjuk sebagai pengelola taman hutan raya maka dari itu dinas lingkungan hidup berperan penting dalam mengelola segala sumber daya hutan. Sesuai dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebagai perwujudan asas desentralisasi maka kepengurusan dari pemerintah pusat dilimpahkan sebagian kepada pemerintah daerah Provinsi kemudian terkait pengelolaan pada Tahura maka dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yakni Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah sebagai tugas pembantuan karena Tahura Bukit Mangkol masih masuk pada wilayah Bangka Tengah.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwasannya pengelolaan terkait Tahura dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota namun apabila letak dari Tahura nya lebih dari satu wilayah adminsitratif maka pengelolaannya berada di dalam naungan pemerintah provinsi tapi jika hanya terletak pada satu wilayah saja, maka pengelolaannya berada hanya pada pemerintah kabupaten kota dimana wilayah Tahura itu berada.

Perlindungan Tahura Bukit Mangkol dari dampak-dampak negatif belum terealisasikan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah. Berdasarkan fakta yang didapatkan dalam observasi awal, masih terdapat banyak sekali kegiatan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, diantara lain ialah pembukaan lahan tanpa izin, penambangan dengan menggunakan alat berat, penebangan pohon dan pembukaan tanah kapling, sesuai pernyataan dari Ibu Lintas selaku Sub Koordinator Pengelolaan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah bahwa dari tahun 2017-2021 kegiatan tanpa izin yang terjadi di kawasan Tahura Bukit mangkol masih naik turun. Tercatat pada tahun 2017 orang yang melakukan kegiatan tanpa izin berupa pembukaan lahan tanpa izin untuk keperluan pribadi mencapai 36 orang, tahun 2018 sebanyak 37 orang, tahun 2019 sebanyak 18 orang, tahun 2020 sebanyak 15 orang, dan tahun 2021 naik lagi sebanyak 23 orang.

Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun-tahun sebelumnya namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan tanpa perizinan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol mulai memiliki titik penyelesaiannya, seperti pada contoh kasus yang terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yang dikutip dari Media Kompas.com. Sebut saja orang tersebut adalah saudara A yang melakukan aktivitas ilegal berupa pembukaan lahan pada Tahura Bukit Mangkol tanpa adanya izin yang menyebabkan putusnya anak sungai sehingga mengubah bentang alam alami sungai di Tahura Bukit Mangkol.

Pelaku-pelaku diatas merupakan pelaku yang telah dicatatkan melalui laporan tahun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan faktanya orang-orang yang melakukan kegiatan tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Mangkol masih sangat banyak sekali dan belum terdata dengan jelas saja.Jika aktivitas tanpa izin ini tidak secepatnya dicegah dan dicari titik penyelesaiannya maka akan berdampak besar pada Kawasan Tahura Bukit Mangkol. Kawasan ini merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak sembarang orang bisa membuka lahan serta Harus ada izin yang resmi jika ingin membuka lahan di kawasan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, muncul keinginan Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP BANGKA TENGAH DALAM MENCEGAH KEGIATAN TANPA IZIN DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL”**

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol ?
2. Apa yang menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol ?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat kita rumuskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di paparkan di atas, maka hasil penelitiaan ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang melimpah bagi khalayak ramai sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teoritis maupun praktis bagi kumpulan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya, sebagai masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya pada penelitian-penelitian terkait Peranan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tanpa izin pada Taman Hutan Raya.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah pengetahuan tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini dan tentunya agar dapat memperkaya pengetahuan bagi pembaca tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah terhadap kegiatan tanpa izin pada Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan peneliti khususnya mengenai tulisan yang sama, dan menjadi khasanah keilmuan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan.

1. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan bahan bacaan bagi masyarakat yang ingin memperluas ilmu pengetahuan mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah terhadap kegiatan tanpa izin pada Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa Penelitian yuridis empiris dapat disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara lapangan dengan melihat, mengamati apa yang terjadi di lapangan serta mengkaji ketentuan hukum mana yang berlaku dan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat (Sunggono, 2019: 41-42)**.** Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang membahas mengenai pemberlakuan atau pengimplementasian dari ketentuan hukum normatif yang dilakukan secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi (Abdul Kadir, 2004: 134). Penelitian yuridis empiris ini juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan nyata yang terjadi pada suatu masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui lalu menemukan fakta serta data yang dibutuhkan dalam penelitian, setelah data tersebut terkumpul maka proses selanjutnya ialah melakukan identifikasi masalah dan terakhir ialah penyelasaian dari masalah tersebut (Bambang Waluyo, 2002: 15). Jenis penelitian ini digunakan oleh Penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah kegiatan tanpa izin di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data primer sebagai sumber data yang utama, tetapi Penulis juga menggunakan sumber data sekunder yang sifatnya melengkapi. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara yang terstruktur rapi dengan para pihak yang berperkara atau para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang kita teliti seperti Dinas Lingkungan Hidup yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari perantara orang atau bisa juga pihak lain selain responden/narasumber penelitian, yang nantinya akan dimuat dalam media pustaka baik itu berupa *online* atau *offline* (Zefri Muhammad dkk, 2019: 311). Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum positif, meliputi:

* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Hutan
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
* Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
* Surat ketetapan Nomor SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016
* Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memperjelas atau sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang belum dipositivisasi secara formil seperti contoh: hasil-hasil penelitian, pendapat ahli hukum, naskah akademik, jurnal ilmiah, tulisan-tulisan internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.
2. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas atau sebagai pelengkap dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal non hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, media internet.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Suatu metode dengan cara menginventarisasi karya-karya seseorang baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian atau bisa juga dari dokumen pendukung lainnya yang nantinya isi dokumen tersebut ditelaah dan dipelajari untuk jadi acuan dalam berfikir bagi penelitian Penulis. Dalam proses pengumpulan data sekunder, Studi kepustakaan menjadi hal yang sangat penting bagi Penulis dalam melakukan penelitian.

1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode dengan cara terjun ke lapangan penelitian secara langsung (observasi langsung) dan melakukan wawancara yang berupa tanya jawab kepada narasumber. untuk mengumpulkan data primer, di sini Penulis melakukan analisa secara langsung terkait temuan nya yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan yang Penulis teliti, studi lapangan ini meliputi:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait bagaimana jalannya ketentuan atau norma-norma hukum yang seharusnya diberlakukan dalam Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dan kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara Penulis dengan narasumber/responden yang memiliki kapabilitas dan berkaitan erat dengan pokok pembahasan dari Penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber/responden didasari pada pedoman wawancara yang baik. Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yaitu:

1. Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup
2. Masyarakat ( Desa Pedindang, Desa Mangkol, Desa Terak, Desa Kelurahan Dul).
3. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif berupa penafsiran (interpretasi), yaitu dengan melakukan pengkajian terkait permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis (Nasution, 2008: 93). Dalam penggunaannya, metode interpretasi digunakan untuk menafsirkan ketentuan terkait peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum penelitian agar dapat diketahui apakah terjadi kekosongan hukum atau tidak, ketidakjelasan hukum atau tidak serta adanya pertentangan norma hukum atau tidak. Dalam melakukan analisis data Muhaimin menyatakan bahwa seluruh bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan Penulis maka proses selanjutnya ialah melakukan analisis berdasarkan masalah yang terjadi untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari permasalahan tersebut dari umum sampai kepada yang konkrit (Alinda, 2021: 93).

# 

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian Penulis tentang “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin pada Taman Hutan Raya Bukit Mangkol” dalam penelusuran kepustakaan, Penulis menemukan beberapa karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas mengenai objek penelitian yang sama dengan Penulis, berkaitan dengan Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin pada Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

Berikut ini adalah beberapa hasil yang Penulis dapatkan dalam penelusuran melalui kepustakaan :

1. Penelitian pertama terdapat dalam Jurnal La Sensu dengan judul “Strategi Pengelolaan Kerusakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Nipa-Nipa di Kota Kendari”. Kesimpulan dari jurnal tersebut yakni demi melindungi Tahura Nipa-Nipa ini Penulis dalam jurnal tersebut membahas 2 masalah yakni: *pertama,* strategi pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa*. Kedua,* strategi penanggulangan atau upaya dan perlindungan Kawasan Tahura Nipa-Nipa. Berdasarkan hasil penelitian ini, lebih menekankan pada strategi pengelolaan taman hutan raya (Tahura) Nipa-Nipa pada kota Kendari demi keberlangsungan

fungsi hutan agar terhindar dari pelaku yang melakukan perusakan pada Tahura Nipa-Nipa karena fungsi utama dari Tahura ini adalah sebagai kawasan konservasi yang dimana pada pemanfaatannya harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berguna bagi khalayak ramai, Kemudian ditemukanlah beberapa strategi yakni dengan melakukan pengawasan diantara lain : *pertama,* melakukan pengawasan diri sendiri *(self monitoring),*agar tidak melakukan perusakan hutan atau lingkungan dan melakukan pencatatan bila ada perusakan yang di lakukan oleh orang lain, *kedua,* perpaduan masyarakat *(citizen complaints),* maksud dari perpaduan masyarakat disini ialah masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pemantauan terkait kondisi lingkungan di kawasan sekitar (Sensu, 2010: 7-8).

1. Penelitian kedua terdapat dalam Skripsi dengan judul “Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada masa pandemi Corona Virus Disease”. kesimpulan dari skripsi ini ialah, pemerintah telah menyusun program untuk mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yakni dengan membuat program-program yang sangat berguna diantara lain : melakukan penutupan kawasan pada Tahura dan pemulihan ekosistem, melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengukuhan kapasitas, melakukan pengawetan, melakukan pencegahan dari aktivitas-aktivitas yang dapat merusak Tahura serta melakukan pengamanan yang tegas. Upaya pemerintah dalam mengelola Tahura Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada masa pandemi Covid 19 yakni : Penyusunan Dokumen Penataan blok, penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang terkait pengelolaan tahura, meningkatkan pengamanan dan pengawasan hutan, dan efektifitas pengelolaan tahura. Beberapa kendala juga sangat berdampak pada pengelolaan Tahura Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seperti : sumber dana keuangan, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga Tahura, dan Virus Covid juga sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah di rancang dengan baik oleh pemerintah (Barik. 2022: 60-61).
2. Penelitian ketiga terdapat dalam skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam Provinsi Jambi” kesimpulan dari skripsi ini ialah terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menjaga Tahura yakni: Strategi Rehabilitasi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Perencanaan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tahura Provinsi Jambi diantara lain upaya dalam mengendalikan kerusakan hutan, meningkatkan pengamanan dan pengawasan hutan untuk mewaspadai terjadinya kebakaran, meningkatan dalam penegakan hukum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar tahura. Adapun mengenai kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan Tahura yakni diantara lain: Keterbatasan sumber dana atau anggaran, Jalan yang sulit di akses, serta rendahnya penegakan hukum di Tahura. Strategi-strategi yang telah di paparkan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mengelola dan melindungi Tahura namun hal itu tidak bisa diterapkan secara sempurna dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi (Aini, 2021: 46-78).

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, maka dapat disimpulkan terkait perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti Penulis, dalam tabel berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Judul Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
| 1. | Strategi Pengelolaan Kerusakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Nipa-Nipa di Kota Kendari | Menganalis mengenai Taman Hutan Raya dan upaya dalam mengatasi problematika yang ada pada Tahura | Dalam penelitian terdahulu hanya terfokus kepada penentuan strategi penanggulangan oleh pemerintah terkait kerusakan yang terjadi pada Tahura dan strategi pengelolaan sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Penulis lebih terfokus kepada apakah peranan dinas lingkungan hidup dalam mencegah kegiatan tanpa izin pada taman hutan raya Bukit Mangkol dan kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah kegiatan tanpa izin dan objek penelitiannya pun berbeda. |
| 2. | Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada masa pandemi Corona Virus Disease | Menganalisis mengenai Taman Hutan Raya dan kendala serta fokusnya juga pada Dinas Lingkungan Hidup | Dalam penelitian terdahulu hanya terfokus kepada kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, program yang bermanfaat bagi Tahura dan upaya mengatasi problematika dalam pengelolaan dan penelitian terdahulu terfokus pada masa covid 19 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih terfokus kepada bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mencegah kegiatan tanpa izin pada Tahura Bukit Mangkol dan penelitian Penulis terfokus di masa covid telah usai serta objek penelitiannya pun berbeda. |
| 3. | Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam Provinsi Jambi | Menganalisis mengenai Taman Hutan Raya dan perlindungan atas Tahura | Dalam penelitian terdahulu hanya terfokus kepada bagaimana strategi pemerintah provinsi jambi dalam melakukan pengelolaan dan kendala dalam pengelolaannya pada Tahura Orang Kayo Hitam sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis lebih terfokus kepada bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin pada tahura bukit mangkol dan juga kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam mencegah kegiatan tanpa izin dan objek penelitian berbeda. |

1. Kerangka Konseptual

### Batasan Istilah

1. **Pengertian Peranan**

Jika diartikan bahwa peranan merupakan perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan yang dimaksud merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang pada posisi tertentu dalam tatanan masyarakat. Posisi tersebut terdiri dari posisi atas sampai bawah. Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya terdiri dari hak dan kewajiban tertentu serta hak dan kewajiban tersebut juga dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam tatanan masyarakat dapat dikatakan sebagai pemegang peran (Bakir, 2009 : 348).

Peranan dalam artian sosiologis (Soekanto, 2017 : 242) merupakan aspek dinamis yang terdiri dari tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki suatu posisi penting dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan perannya dengan baik maka akan menimbulkan efek positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Secara umum peran dapat didefinisikan sebagai kehadiran seseorang ataupun instansi dalam menentukan dan menjalankan sesuatu sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya. Peran dapat juga dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada individu atau sekumpulan individu. Aspek-aspek dalam peranan terdiri dari :

1. Peranan terdiri dari norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam instansi atau masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep terkait apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat.
3. Peranan juga dapat dimaknai sebagai perilaku seseorang dalam melaksanakan peranannya dalam suatu instansi atau masyarakat dan sangat berpengaruh bagi struktur sosial di masyarakat.
4. **Pencegahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Pencegahan atau preventif merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi sehingga pencegahan dapat di maknai sebagai tindakan. Dilansir dari suduthukum.com bahwa upaya pencegahan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan merupakan suatu tindakan untuk menghambat agar tidak terjadi sesuatu. Pencegahan juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghambat terjadi kembali masalah sosial (Al Adawiah, 2015 : 288).

Prinsip pencegahan bertujuan untuk mencegah kerusakan yang terjadi secara spesifik, misalnya kerusakan yang di sebabkan oleh manusia. Prinsip pencegahan merupakan prinsip fundamental dalam upaya memberikan perlindungan seperti perlindungan atas lingkungan hidup. Upaya seperti penegakan hukum lingkungan seharusnya dilaksanakan apabila upaya pencegahan tidak berjalan dengan efektif (Listyani Nurul dkk, 2018 : 224).

1. **Kegiatan tanpa izin atau ilegal**

Kegiatan tanpa izin atau ilegal dilansir dari konspirasikeadilan.id merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sah. Contoh dari kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan tanpa izin atau ilegal antara lain:

1. *Fitech Ilegal*

*Fitect Ilegal* merupakan jasa keuangan atau pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK (otoritas jasa keuangan)

1. *Ilegal Fishing*

*Ilegal Fishing* merupakan suatu kegiatan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak memiliki izin termasuk juga nelayan asing. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melanggar aturan dari pemanfaatan sumber daya laut

1. *Ilegal logging*

*Ilegall Logging* merupakan kegiatan menebang pohon di hutan, lalu mengangkut kemudian menjual kayu tersebut kepada seseorang yang tentunya kegiatan tersebut tidak memiliki izin atau ilegal.

1. *Ilegal Dumping*

*Ilegal Dumping* merupakan kegiatan yang melakukan pembuangan sampah atau limbah di daerah yang tidak memiliki izin.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan contoh dari kegiatan tanpa izin atau ilegal dan yang berhak dalam penyelesaiannya adalah pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain maka dari itu pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi ketetiban agar masyarakat dapat menjalani hari-harinya dengan tenteram dan aman (Rohayatin, 2021: 7-9) sehingga pada kesimpulannya segala sesuatu yang bersifat tanpa izin atau ilegal maka perbuatan yang dilakukan seseorang atau instansi merupakan perbuatan yang tidak sah menurut perundangan-undangan yang berlaku.

1. **Kewenangan, Tujuan dan Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup**

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbunyi

“Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten / Kota di bidang lingkungan hidup”

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya memiliki kewenangan berupa adanya korelasi antara pemerintahan daerah tingkat provinsi dengan pemerintahan kabupaten atau kota. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan pengawasan lingkungan yang berada dibawah lingkup dinas lingkungan hidup (Budiman & Utari dkk, 2019: 121).

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DLH mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Mencermati pernyataaan di atas mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah maka tidak lain tidak bukan itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah adalah: Mewujudkan lingkungan yang bernilai baik untuk pembangunan bertahap dan berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan di bidang persampahan dengan sasarannya ialah desa dan kelurahan serta mewujudkan tata kelola organisasi yang terstruktur dan memiliki nilai yang bermanfaaat (Hidayah Syarik, 2019: 4).

1. **Taman Hutan Raya**

Taman Hutan Raya merupakan suatu wilayah pelestarian alam yang digunakan dengan tujuan yang bermacam-macam baik itu untuk koleksi tumbuhan yang terdiri dari alami, buatan, jenis asli dan bukan asli, kemudian Taman Hutan Raya ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Hal ini termaktum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mencermati penjelasan dari Taman Hutan Raya, maka disini Tahura menjadi bagian yang sangat penting dan haruslah dipelihara, dilindungi, dan dilestarikan sumberdaya hutannya melalui proses pengelolaan tahura yang baik dan tepat sasaran (Serlinta Bangun & Ashabul Anhar , 2020: 179).

Membahas mengenai manajemen atau pengelolaan maka di dalamnya kita akan melihat sebuah fungsi, karena segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan maka tidak lepas pada fungsinya, dalam manajemen atau pengelolaan terdapat fungsi penting didalamnya yakni: fungsi perencanaan, pengeloaan, serta pengawasan. Beberapa ahli berpendapat mengenai Definisi pengelolaan yaitu:

1. Geory R. Terry

Menurut Geory dia mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah bentuk dari proses yang khusus dan terdapat juga beberapa macam tindakan yakni: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan serta pengawasan.

1. John M. Pfiffner

Menurut John pengelolaan merupakan suatu konteks yang berhubungan dengan pengarahan berupa organ internal di dalamnya.

1. Howard M. Carlisle

Menurut Howard pengelolaan merupakan suatu cara yang pada intinya untuk menggapai tujuan dengan cara efektif dan efisien seperti dengan melakukan penggabungan, pengaturan dan pemanfaatan dari suatu komponen kelompok (Barik, 2022: 24-25).

Howard membagi pengelolaan kedalam tiga tahap:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menyusun pengoperasian dan pemanfaatan hutan yang terdiri dari kegiatan perencanaan seperti tata ruang, rencana kehutanan, dan rencana anggaran yang harus didasarkan pada Peraturan perundang-perundangan terkait kewenangan yang diberikan pada pemerintah dalam menyusun anggaran.

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait pengoperasian, pemanfaatan hutan dan lahan serta dalam hal ini pemerintah akan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kewenangannya baik itu penyelesaian di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan

1. Partisipasi

Partipisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan baik dari sektor hutan dan lahan (Yustisia Rahman & Citra Hartati dkk, 2013: 2-3).

### **Kerangka Teori**

1. **Teori Kewenangan**

Membahas mengenai kajian hukum administrasi maka kewenangan atau wewenang memiliki peran yang sangat penting. Ahli bernama F.A.M Stroink dan J,G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in he staats-en adminitratief recht”*(Winarno, 2008: 65). Pengertiannya adalah konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi adalah wewenang, kekuasaan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai pemangku dari kekuasaan tersebut harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kewenangan atau wewenang dapat diartikan sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan hukum dan dari kekuasaan tersebut dia mendapatkan hak untuk memerintah atau bertindak sesuai dengan wewenangnya.

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dapat kita temukan dalam studi ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Acapkali kekuasaan sering dimaknai sama mengenai definisinya dengan kewenangan, dan kekuasaan juga sering dipertukarkan definisinya dengan istilah kewenangan begitupun sebaliknya. Jika berbicara mengenai kekuasaan maka didalamnya akan kita temukan suatu hubungan seperti “ada satu pihak yang memerintah dan ada juga pihak lain yang diperintah” hal ini dinamakan sebagai *the rule and the ruled* (Budiardjo, 2007: 35-36). Ada tiga komponen yang menentukan bahwa wewenang sebagai konsep dari hukum publik yakni:

1. Komponen Pengaruh merupakan wewenang dalam penggunaannya digunakan untuk mengawasi dan mengontrol perilaku dari subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum merupakan komponen yang menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai wewenang maka tidak lepas dari dasar hukum yang mengaturnya dan selalu dapat ditunjukan tanpa perlu ditutupi.
3. Komponen konformitas merupakan suatu komponen yang mengandung makna bahwa adanya suatu standar dalam wewenang yakni standar umum yang dimaknai sebagai semua jenis wewenang dan standar khusus yang dimaknai sebagai jenis wewenang tertentu saja (Winarno, 2008: 66).

Asas legalitas menjadi konsep utama dalam suatu negara hukum maka dari itu atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah sumbernya dari Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar legalitas dalam hukum positif dapat menjadi acuan dalam penggunaan wewenang. Hal ini untuk menanggulangi terjadinya kegiatan yang merugikan seperti perbuatan yang sewenang-wenang. Hukum positif membeatasi penggunaan wewenang pemerintah. Jika berbicara mengenai konsep negara hukum maka dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan maka dilakukan batas-batas dan patuh terhadap hukum fositif dan hukum tidak tertulis (Indroharto, 2002: 69). Terdapat dua macam hukum berdasarkan hukum pemerintahan indonesia yakni,hukum positif dan hukum tidak tertulis yang disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Mencermati penjelasan diatas, bahwa wewenang berhubungan dengan kekuasaan dalam ranah hukum publik. Kekuasaan dan kewenangan bermakna sama seperti, Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam menyelenggarakan keinginannya meskipun nantinya akan menghadapi pihak-pihak lain yang menentang keinginan dari individu atau kelompok tersebut. Faktor penyebab munculnya kemampuan untuk melaksanakan keinginannya karena adanya kekuatan baik dari fisik, keunggulan psikologis, atau kemampuan intelektual dari individu tersebut. Ada juga yang menjelaskan bahwasannya kekuasaan merupakan suatu unsur yang sangat penting dari suatu negara dalam proses pelaksanaan pemerintah. (Marzuki, 2014: 73).

Membahas mengenai apa itu kewenangan maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu dalam suatu sistem pemerintahan Sedangkan berbeda dengan wewenang yang hanya terfokus pada bagian tertentu saja. Wewenang merupakan suatu hak untuk memberikan perintah atau bisa saja seperti membuat keputusan yang isinya mengatur tata tertib masyarakat kemududian memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain atau bawahannya dalam struktur pemerintahan sebagai perwujudan dari kata memerintah (Sely, 2021: 36).

1. **Teori Pengawasan**
2. Pengertian Pengawasan

Menurut Stoner dan Wankel pengawasan merupakan suatu proses dimana seorang manajer akan berusaha mengendalikan segala sesuatu pada organisasi agar tetap pada tujuannya namun apabila salah satu bagian dari organisasi tersebut menuju pada tujuan yang tidak sejalan lagi dengan tujuan pertamanya maka nantinya manajer ini akan mencari sumber dari masalah tersebut dan kemudian akan mengarahkan kembali organisasi ini pada tujuan yang benar. McFarland juga menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses ketika pemimpin mengontrol dan mengawasi hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggotanya apakah sama dengan rencana, perintah dan tujuan yang telah diberikan oleh pimpinan sebelum pekerjaan tersebut dimulai (Glendoh, 2000: 45-46).

Menurut Heidjarachman dan Husnan bahwa pengawasan merupakan proses yang terdiri dari mengamati dan membandingkan terkait rencana, pelaksanaan lalu mengoreksi apabila terjadi kesalahan dan kemudian memperbaiki kesalahan tersebut agar tetap pada rencana yang semula telah dIbuat (Purwadi, 2017: 188).

Berbagai pendapat mengenai pengawasan dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses berupa pemantauan, atau mengontrol terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang baik sebelum kegiatan itu dimulai atau kegiatan yang telah dimulai. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan berjalan dengan baik dan benar.

1. Kegunaan dan Maksud Adanya Pengawasan

Pengawasan berperan sangat penting dalam melakukan tugas pemerintahan. Menurut Rahayu Rahmawati sebelumnya (Silvi, 2021: 21-23) terdapat delapan manfaat dari pengawasan, yaitu :

1. *Pertama,* pengawasan menjadi pokok standarisasi dari proses pelaksanaan kegiatan karena dapat meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu dan juga biaya;
2. *Kedua,* pengawasan berperan penting dalam proses pengamanan baik berupa aset perusahaan atau organisasi dari adanya pencurian, korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
3. *Ketiga,* pengawasan menjadi standarisasi mutu;
4. *Keempat,* pengawasan berperan dalam membatasi terjadinya kekuasaan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan;
5. *Kelima,* pengawasan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas;
6. *Keenam,* pengawasan berperan dalam proses pemantauan terkait pelaksanaan kegiatan;
7. *Ketujuh,* pengawasan yang dilakukan oleh ketua atau manajemen puncak berperan dalam menjaga keseimbangan antara rencana dan program yang dIbuat oleh organisasi atau perusahaan;
8. *Kedelapan,* pengawasan menjadi sumber motivasi bagi individu-individu

Arifin Abdul Rachman juga menjelaskan bahwa maksud dari adanya pengawasan adalah :

1. Agar mengetahui apakah segala sesuatu berupa rencana, program dan strategi telah berjalan dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Agar mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan arahan-arahan yang telah dijelaskan;
3. Agar melakukan pencegahan terkait kegiatan-kegiatan yang salah dengan cara melakukan identifikasi mengenai kesulitan, kelemahan, kegagalan sehingga nantinya dapat dicari titik penyelesaiannya;
4. Agar mengawasi apakah segala suatu pekerjaan yang telah diperintahkan telah berjalan secara benar atau tidak dan apabila ada perbaikan maka perbaikan tersebut dapat lebih efektif lagi dari sebelumnya.

Berbagai macam pendapat-pendapat yang telah dijelaskan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegunaan dan maksud dari adanya pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui apakah segala tugas atau pekerjaan yang telah diberikan sebelumnya telah terlaksana dengan baik atau tidak dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan maka nantinya akan segera dilakukan perbaikan dari kesalahan tersebut dan dicari titik dari munculnya kesalahan itu dimana. Pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh

1. Unsur-unsur dalam Tindakan Pengawasan

Sebagai wujud melaksanakan tindakan berupa pengawasan maka didalam pengawasan harus terdapat unsur-unsur sebagai penunjang dalam suatu pekerjaan agar berjalan dengan semestinya, beberapa unsur tersebut meliputi (Muchsan, 2000: 38):

1. *Pertama,* yang berhak dalam melakukan pengawasan adalah orang yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan;
2. *Kedua,* terdapat suatu rencana yang terstruktur;
3. *Ketiga,* pengawasan dapat dilaksanakan ketika proses kegiatan tersebut sedang berjalan atau kegiatan tersebut telah selesai dijalankan dengan melihat pada hasilnya;
4. *Keempat,* melakukan evaluasi akhir pada kegiatan yang telah dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai
5. *Kelima,* setelah tindakan pengawasan telah selesai maka berikutnya akan dilakukan tindakan lanjutan baik secara yuridis maupun secara administratif.
6. Jenis Pengawasan

Menurut (Handoko, 2015 : 361) pengawasan dikelompokan ke dalam tiga jenis yakni :

1. Pengawasan Pendahuluan atau *Steering Controls*, pengawasan ini merupakan pengawasan dalam prosesnya menggunakan cara pendeteksian terkait masalah lalu menentukan tindakan apa yang diperlukan dalam mengatasi hal tersebut sebelum masalah tersebut terjadi. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengawasan bersifat preventif yang berarti dalam melakukan suatu tindakan berupa pencegahan maka harus dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi.
2. Pengawasan *Concurrent*, merupakan pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Jadi pengawasan ini harus ada suatu prosedur yang menentukan apakah kegiatan tersebut bisa berlanjut atau tidak.
3. Pengawasan *Past Action Controls*, merupakan pengawasan yang bersifat historis. Maksudnya, dalam menilai suatu kegiatan maka dilakukan setelah kegiatan tersebut terlaksana dengan tujuan untuk menilai hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Ciri-ciri Pengawasan yang Efektif

Mamduh M. Hanafi (Badrudin, 2015: 229-230) mengemukakan bahwa ada sembilan ciri ciri dari pengawasan yang efektif yaitu :

1. Sesuai dengan rencana dan struktur organisasi

Suatu pengawasan yang dinilai benar dan efektif dinilai dari hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang direncakan atau tidak.

1. Sesuai dengan manajer

Suatu pengawasan dinilai baik dan efektif apabila telah sesuai dengan karateristik manajer dan nantinya dari pengawasan yang sesuai dengan karateristik manajer maka akan menghasilan informasi yang baik dan mudah dimengerti. Informasi tersebut dapat berupa bagan atau grafik.

1. Ekonomis

Suatu kegiatan yang dilakukan seperti pengawasan harus memperhitungkan segala biaya yang keluar. Maksudnya, dalam melakukan pengawasan maka manfaat dari adanya pengawasan haruslah lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pengawasan.

1. Akurat

Informasi yang akurat adalah hal yang paling dibutuhkan dalam melakukan pengawasan karena apabila informasi yang didapat dalam pengawasan tidak akurat maka nantinya pengawasan akan berjalan tidak baik dan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

1. Tepat Waktu

Informasi harus didapatkan tepat waktu karena apabila informasinya tidak tepat waktu diberikan maka nantinya akan menyebabkan pengawasan berjalan tidak optimal.

1. Fleksibel

Sistem pengawasan harus fleksibel. Maksudnya, pengawasan harus berlandaskan dari rencana yang fleksibel dengan berpikir visioner terkait perubahan yang akan terjadi di kemudian hari seperti tingkat penjualan yang berubah menjadi lebih rendah atau lebih tinggi.

1. Objektif dan bisa dipahami

Sistem pengawasan harus jelas dan objektif seperti dengan memberi penjelasan kepada anggota secara detail untuk menunjang keberhasilan dari suatu rencana.

1. Mengarah pada perbaikan

Sistem pengawasan harus mengarah pada perbaikan.

1. Fokus pada titik strategi

Sistem pengawasan harus memfokuskan pada titik strategi kesalahan-kesalahan apa saja yang akan mengakibatkan kerugian yang besar.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tempat Lokasi Penelitian
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
3. Sejarah singkat

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Sejarah singkat Tahura Bukit Mangkol

Taman Hutan Raya Bukit Mangkol merupakan hutan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016. sesuai dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tunbuhan dan / atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi”

Kawasan Tahura Bukit Mangkol memiliki luas sekitar 6.0009,51 Hektar. Kawasan Tahura Bukit Mangkol dikelilingi oleh 11 Desa yaitu Desa Terak, Desa Pedindang, Desa Mangkol, Desa Kelurahan Dul, Desa Beluluk, Desa Jeruk, Desa Air Mesu, Desa Cambai Selatan, Desa Puput, Desa Simpang Katis Beruas, Desa Teru. Penduduk dari 11 desa tersebut mayoritas adalah melayu dan minoritasnya terdiri dari suku pendatang yaitu China hal ini sesuai dengan wawancara yang Penulis lakukan kepada Ibu Lintas Selaku Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Mei 2023.

1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah Dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol

Sesuai amanat yang telah disampaikan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”

Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak dari setiap orang yang salah satunya adalah mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka harus ada pihak atau instansi yang berfungsi untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup tersebut.

Lingkungan hidup terdiri dari beberapa keanekaragaman yaitu keanekaragaman hayati dan hewani. Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dalam menjaga kestabilan ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai tempat semua makhluk hidup bergantung. Tumbuhan berperan sebagai sumber energi atau produsen dalam suatu kehidupan makhluk hidup dan juga sebagai penentu dalam suatu kondisi lingkungan karena, apabila lingkungan tersebut masih terdapat banyak sekali tumbuhan maka, sudah dipastikan kehidupan makhluk hidup di lingkungan tersebut terbilang sehat dan aman. Terkait pentingnya peranan dari tumbuhan maka pengelolaan dan perlindungan dari kawasan hutan harus dilakukan secara terstruktur dan tentunya berwawasan lingkungan agar tidak merusak fungsi dari tanah, air, udara, iklim agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat (Maisyaroh, 2010 : 2)

Begitu juga dengan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang dikategorikan sebagai hutan konservasi dan juga merupakan bagian dari lingkungan hidup serta harus dikelola dan dilindungi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah disini merupakan instansi yang diberikan mandat oleh Pemerintah dalam perihal pengelolaan dan perlindungan atas Taman Hutan Raya Bukit Mangkol karena Tahura Bukit Mangkol berada pada wilayah Bangka Tengah, hal ini sesuai dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Berdasarkan teori kewenangan sebagaimana yang telah diuraikan Penulis dalam kerangka teori pada bab sebelumnya, bahwa kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu dalam suatu sistem pemerintahan sedangkan wewenang merupakan suatu hak untuk memberikan perintah atau bisa saja seperti membuat keputusan yang isinya mengatur tata tertib masyarakat, memerintah dan memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain atau bawahannya dalam struktur pemerintahn sebagai perwujudan dari kata memerintah.sesuai dengan kewenangannya mengenai instansi yang megelola dan melindungi Tahura Bukit Mangkol adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah karena berada pada wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Sesuai fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah salah satunya adalah memberikan perlindungan yang berarti apabila ingin melindungi sesuatu dari hal-hal yang dapat merugikan maka tindakan pertama yang harus diambil adalah melakukan pencegahan. Pencegahan merupakan suatu bentuk tindakan Preventif dimana kita mencegah terjadinya suatu hal yang dinilai buruk. Secara etimologi pencegahan atau preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang berarti antisipasi atau dapat diartikan sebagai mencegah agar tidak terjadi sesuatu. Bila diartikan secara luas pencegahan diartikan sebagai upaya seseorang untuk mencegah terjadinya kerusakan, gangguan, atau kerugian yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara sadar atau sengaja. Secara sudut pandang hukum, pencegahan merupakan suatu bentuk dari proses, cara, tindakan yang berupa mencegah, tindakan yang berupa menahan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun tempat (Marpaung, 2001 : 10).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam struktur organisasinya membidangi beberapa bidang salah satunya adalah Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau yang dibawahnya terdiri dari dua bidang yaitu: Subkoordinator Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau. Sesuai dalam Pasal 27 ayat (3) angka 8 Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa fungsi dari Sub Koordinator Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama dan penyakit pada kawasan Tahura Daerah.

Salah satu dari tugas Sub Koordinator berdasarkan penjelasan di atas adalah melakukan pencegahan dimana pencegahan ini merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk menanggulangi beberapa tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada Tahura Bukit Mangkol seperti kegiatan tanpa izin yang terjadi di Tahura Bukit Mangkol . Tindakan-tindakan tanpa izin tersebut terdiri dari Pertambangan timah, *ilegal logging* atau penebangan pohon, dan pembukaan tanah kapling. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lintas selaku Pengelola Pelestarian Sumber daya Alam dibawah Sub Koordinator Pengelolaan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah pada tanggal 24 Mei 2023 mengatakan:

“*Kegiatan tanpa izin yang sering terjadi di Tahura Bukit Mangkol ini adalah Pertambangan Timah karena mengingat Pulau Bangka adalah Pulau yang memiliki kekayaan timah yang cukup besar. Tetapi penebangan pohon juga sering terjadi dan untuk pembukaan tanah kapling pada Tahura Bukit Mangkol kebanyakan merupakan milik penduduk yang sudah lama punya lahan di kawasan Tahura Bukit Mangkol, lahan mereka telah ada dari sebelum Tahura bukit Mangkol ini ditetapkan sebagai Tahura maka dari itu kami tidak bisa melakukan penindakan berupa penutupan kawasan namun hal yang bisa kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada pemilik lahan tersebut tentang hal yang boleh dilakukan didalam Tahura dan hal yang tidak boleh dilakukan”.*

Persentase yang telah di paparkan di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 orang yang melakukan kegiatan tanpa izin sebanyak 37 orang, 2018 sebanyak 37 orang, 2019 sebanyak 18 orang, 2020 sebanyak 15 orang, 2021 naik lagi sebanyak 23 orang. Persentase tersebut menunjukan bahwa kegiatan tanpa izin yang terjadi di Tahura Bukit Mangkol masih naik turun.

Sudah jelas secara hukum bahwa hal-hal yang bersifat ilegal atau tanpa izin sangat dilarang tegas oleh negara seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
5. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
7. Membawa alat-alat berat dan alat—alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan tanpa izin pejabat yang berwenang.
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar”

Faktanya kegiatan-kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol ini masih marak terjadi sehingga untuk mencegah kegiatan seperti tanpa izin ini kembali terjadi dan makin banyak menimbulkan kerusakan pada Taman Hutan Raya Bukit mangkol, maka berdasarkan wawancara dari Ibu Lintas pada tanggal 24 Mei 2023, Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan beberapa program-program pencegahan yang dinamakan sebagai program pengamanan kawasan hutan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada Tahura Bukit Mangkol dari pelaku kegiatan tanpa izin.

1. Pengamanan kawasan hutan

Pengamanan kawasan hutan merupakan suatu usaha dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi kawasan Tahura dan segala hasil hutan yang ada di kawasan Tahura dari kerusakan dan juga dapat didefiniskan sebagai suatu rangkaian kegiatan, upaya dan usaha yang dilakukan oleh pihak instansi yang membidangi Tahura seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kehutanan. Masyarakat juga berperan dalam perihal pengamanan kawasan hutan yang salah satunya adalah Tahura. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di Tahura diantara lain disebakan oleh perbuatan manusia, hewan dan faktor alam.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi di Tahura Bukit Mangkol banyak disebabkan oleh manusia. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat menyebabkan kualitas sumber daya alam yang ada di Tahura Bukit Mangkol menjadi menurun dan ini menyalahi definisi dari Tahura itu sendiri yang termaktum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kehadiran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam Pengelolaan serta perlindungan Tahura Bukit Mangkol sangat begitu penting, sehingga kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sangat diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi Taman Hutan Raya dan menjaga Tahura Bukit Mangkol ini dari kerusakan-kerusakan. Berikut beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan :

1. Patroli Rutin

Patroli Rutin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga pengamanan hutan yang berjumlah 8 orang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi Tahura Bukit Mangkol. Patroli ini dilaksanakan rutin setiap hari dengan pembagian setengah-setengah dari 8 Tenaga Pengamanan kawasan hutan tersebut.

|  |  |
| --- | --- |
| No | Nama Tenaga Pengamanan hutan |
| 1. | Subri Jaya |
| 2. | Yadi Permana |
| 3. | Rasyid Noverdi |
| 4. | Indra Wiguna |
| 5. | Fajar |
| 6. | Duta Prasetyo |
| 7. | Risky Maulana Pratama |
| 8. | Patri Indriano |

Apabila jika hanya terdapat 8 orang tenaga pengamanan hutan di Tahura Bukit Mangkol sedangkan wilayah Tahura yang sangat begitu luas hingga mencapai 6.0009,51 Hektar tidaklah efektif dan optimal. Kendala dalam perihal patroli ini juga disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Lintas selaku pengelola pelestarian sumber daya alam pada tanggal 24 Mei 2023, dia mengatakan:

*“ patroli ini dilaksanakan rutin setiap hari oleh tenaga pengamanan kawasan hutan, namun yang menjadi kendalanya adalah sedikitnya anggota dari tenaga pengamanan hutan sehingga apabila ada suatu kegiatan seperti inventarisasi, penyuluhan dan lain sebagainya, maka otomatis yang melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penyuluhan ini adalah tenaga pengamanan hutan tersebut sehingga kegiatan patroli rutin ini jadi kurang optimal dikarenakan anggota lain sedang menjalankan kegiatan lain.”*

Kendala-kendala selain kurangnya tenaga pengamanan hutan di Tahura Bukit Mangkol adalah kendala dalam patroli dengan hadirnya tambang timah tungau karena tambang timah tungau, merupakan tambang yang sangat mudah sekali dalam penggunaannya. Alat-alatnya juga sangat mudah dibawa seperti mesin yang berukuran kecil, pipa berukuran sedang yang mudah dibawa sehingga tambang timah tungau ini sangat mudah sekali dalam berpindah-pindah tempat. Inilah yang menjadi kendala dalam patroli karena apabila si pelaku tambang timah tungau ini melakukan tambang di Tahura Bukit Mangkol dan berhasil di tindak oleh tim pengamanan tahura maka di kemudian hari mereka akan mencari lagi tempat lain yang masih berada pada seputaran kawasan Tahura Bukit Mangkol sehingga proses perpindahan yang begitu cepat dari satu lokasi ke lokasi lain menyebabkan Tenaga pengamanan kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol kesulitan dalam penindakannya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu lintas bahwa menurut Penulis kegiatan patroli yang dilakukan oleh tenaga pengamanan kawasan hutan di Tahura belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di Tahura Bukit Mangkol. Kurangnya tenaga Pengamanan Kawasan ini juga menyebabkan kesulitan dalam penindakan seperti kehadiran tambang timah tungau. Akan lebih baik apabila jumlah sumber daya manusia di Tahura Bukit Mangkol ditambah lagi untuk menunjang kualitas keamanan sehingga Tahura akan diawasi setiap hari perkembangannya dan ini juga dapat mengantisipasi apabila terjadinya kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol seperti tambang timah tungau dan lain-lain.

Jika pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah telah memperbaiki kualitas kerja. Berhasil atau tidaknya suatu pencapaian dapat dilihat dari hasil akhirnya. Dalam proses pencegahan terjadinya kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol maka, tidak hanya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah selaku pemangku dari kawasan tetapi seluruh elemen masyarakat juga perlu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sebuah rasa tanggung jawab dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan masyarakat juga sangatlah penting agar terciptanya Tahura yang bebas dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada Tahura Bukit Mangkol.

1. Menerima pengaduan masyarakat atas kegiatan tanpa izin pada kawasan Tahura Bukit Mangkol

Sudah seharusnya selain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang diberikan mandat untuk mengelola dan melindungi Tahura Bukit Mangkol, masyarakat juga berperan dalam perihal perlindungannya, apabila masyarakatnya juga ikut andil dalam melindungi Tahura Bukit Mangkol maka kegiatan tanpa izin akan berkurang dan diharapkan akan tidak ada lagi.

Cara masyarakat dalam berpartisipasi dalam menjaga tahura bermacam-macam salah satunya adalah memberikan aduan kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah selaku pihak pengelola Tahura Bukit Mangkol.

Ibu Lintas selaku pengelola pelestarian sumber daya alam pada sesi wawancara yang Penulis lakukan pada tanggal 24 Mei 2023 mengatakan yaitu:

*”salah satu dari peran Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah adalah menerima aduan dari masyrakat apabila terjadinya kegiatan tanpa izin di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol”*

Menurut Penulis dalam perihal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah menerima aduan dari masyarakat apabila ada kegiatan tanpa izin yang terjadi di kawasan Tahura Bukit Mangkol saya rasa sudah cukup baik meskipun tidak semua masyarakat tingkat kesadarannya masih rendah terhadap lingkungan sekitar. Akan lebih baik dan optimal lagi jika masyarakat yang memberikan aduan kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai kegiatan tanpa izin yang terjadi diberi apresiasi atau mungkin hadiah agar semua masyarakat tergerak hatinya agar lebih sadar lagi kepada lingungan sekitar.

1. Mendata pengguna kawasan yang menempati Tahura Bukit Mangkol

Mendata pengguna kawasan yang menempati Tahura Bukit Mangkol adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah selaku pemangku kawasan. Tahura Bukit Mangkol seharusnya tidak boleh ada orang yang menempati kawasan tersebut bila tidak ada izin dari pemerintah dan apabila ada yang mendiami dalam penggunaannya, harus sesuai dengan fungsi dari zona pemanfaatan hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berbunyi:

“Pemanfaatan Tahura hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk”

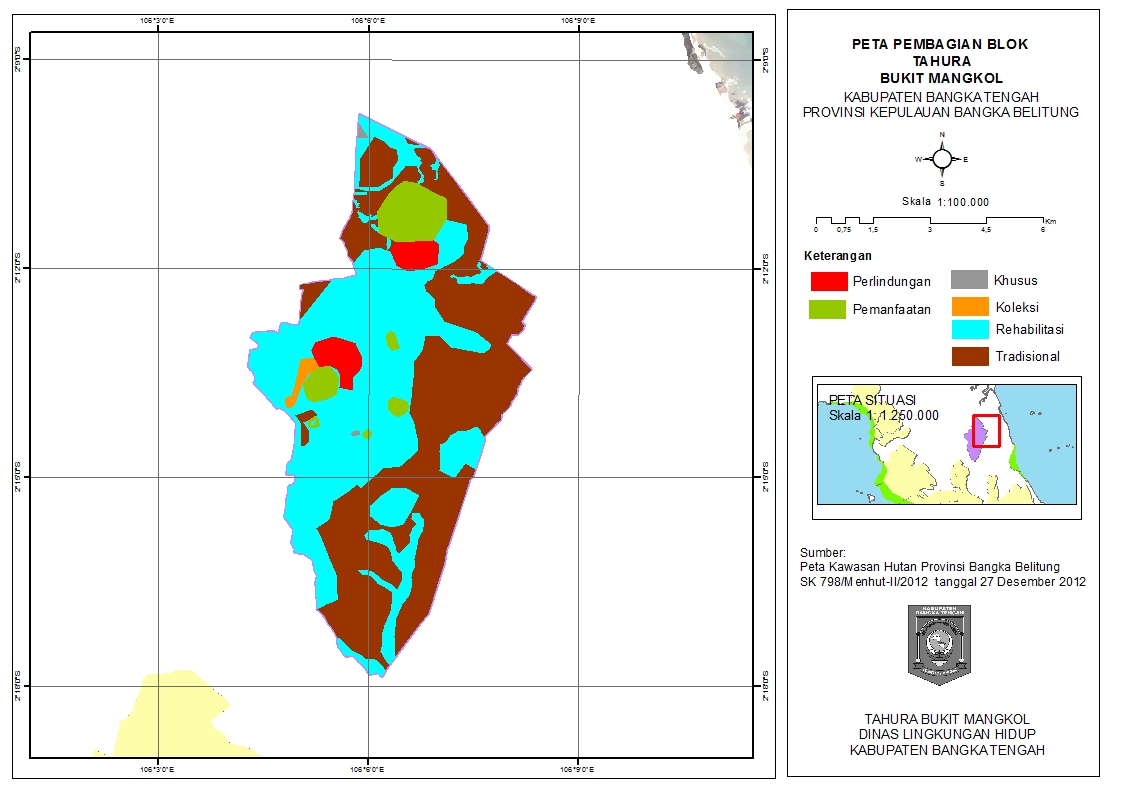
Begitu juga seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”

Masyarakat yang mendiami kawasan Tahura Bukit Mangkol rata-rata merupakan pengguna yang sudah lama ada sebelum Tahura Bukit Mangkol ini ditetapkan menjadi Tahura Bukit Mangkol. Hal ini juga menjadi kendala dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dalam pencegahan kegiatan tanpa izin. Hadirnya mereka yang mendiami kawasan Tahura Bukit Mangkol otomatis membuat pihak Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah harusesktra dalam mengawasinya. Sesuai wawancara dari Ibu Lintas Selaku Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam pada tanggal 24 Mei 2023 mengatakan:

*“yang mendiami kawasan Tahura Bukit Mangkol terbilang cukup banyak sekali. Dan kami juga tidak berhak untuk melakukan penindakan berupa pengusiran karena mereka mendiami tahura bukit mangkol sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi Tahura Bukit Mangkol. Mayoritas dari pemilik lahan tersebut menggunakan lahan untuk berkebun. Untuk itu penindakan yang kami lakukan agar si pemilik lahan tidak sewenang-wenang dalam melakukan aktivitas di Kawasan Tahura Bukit Mangkol yaitu dengan cara menghimbau atau mensosialisasikan terkait hal yang boleh atau tidak dilakukan di Tahura Bukit Mangkol. Untuk mereka yang sudah terlanjur ada dan mendiami Kawasan Tahura Bukit Mangkol maka kami menaruh mereka pada Blok Tradisional”*

Blok-blok yang ada pada Tahura Bukit Mangkol terdiri dari:

1. Blok Perlindungan : 200,05 Hektar
2. Blok Pemanfaatan : 291, 69 Hektar
3. Blok Lainnya : 5.512,35 Hektar
4. Blok Tradisional : 2.700,76 Hektar
5. Blok Khusus : 8,49 Hektar
6. Blok Koleksi : 38,85 Hektar
7. Blok Rehabilitasi : 2.769,67 Hektar

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah

Penentuan blok-blok ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, dan Blok Pengelolaan Tahura, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pemetaaan potensi kawasan konservasi
2. Inventarisasi dan pengumpulan data untuk blok
3. Pengolahan dan analisis data
4. Draft peta blok dan dokumen pengelolaan
5. Input atau masukan konsultasi publik
6. Verfikasi
7. Cek lapangan
8. Pengolahan dan analisa data ulang
9. Draft final dokumen dan peta blok pengelolaan

Sesuai yang dikatakan Ibu Lintas dalam sesi wawancara bahwa masyarakat yang telah terlanjur mendiami kawasan Tahura Bukit Mangkol mereka di tempatkan pada Blok Tradisional. Berikut merupakan total dari inventarisasi data penggunaan lahan oleh masyarakat yang menempati Tahura Bukit Mangkol dari tahun 2017-2018 :

2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Penggunaan | Luas |
| 1. | Kebun Desa Pedindang | 65,51 |
| 2. | Kebun Desa Terak | 5,85 |
| 3. | Kebun Desa Air Mesu | 45,6 |
| 4. | Kebun Kelurahan Dul | 44,58 |
| 5. | Penggunaan Pihak ke 3 | 88,49 |
|  | Total | 250,03 |

2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Penggunaan | Luas |
| 1. | Kebun Desa Kelurahan Dul | 35,744 |
| 2. | Kebun Desa Beruas | 72,822 |
| 3. | Kebun Desa Air Mesu | 15,131 |
| 4. | Kebun Desa Puput | 52,292 |
| 5. | Kebun Desa Cambai | 38,128 |
| 6. | Kebun Desa Beluluk | 3,465 |
|  | Total | 217,582 |

Berdasarkan data yang didapatkan dari sesi wawancara oleh Ibu Lintas Selaku Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam pada tanggal 2 Juni 2023 bahwa banyak sekali masyarakat yang mempunyai lahan di Kawasan Tahura Bukit Mangkol dan kebanyakan pemilik dari masing-masing lahan tersebut sudah berpindah-pindah tangan atau berpindah-pindah kepemilikan. Banyaknya masyarakat yang mempunyai lahan di Tahura Bukit Mangkol membuat pihak dari Dinas Lingkungan Hidup harus lebih maksimal lagi dalam melakukan himbauan kepada si pemilik lahan terkait hal yang boleh dan tidak di lakukan dan tentunya pengawasan juga harus dilakukan secara penuh agar si pemilik lahan tidak sewenang-wenang dalam kegiatannya karena, walaupun lahan tersebut milik pribadi namun tetap saja lahan pribadi tersebut ada dalam kawasan Tahura Bukit Mangkol yang tentunya harus mengikuti segala aturan yang berlaku.

1. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi merupakan bentuk dari peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam proses mencegah kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol terjadi. Kegiatan seperti sosialisasi ini menjadi kegiatan yang penting karena fungsinya adalah untuk mensosialisasikan atau menjelaskan mengenai materi-materi yang penting untuk masyarakat salah satunya adalah sosialisasi mengenai Tahura. Berdasarkan wawancara dari Ibu Lintas selaku pengelola pelestarian sumber daya alam pada tanggal 24 Mei 2023 :

*“kegiatan seperti sosialisasi resmi sebenarnya sudah ada kami laksanakan sejak Tahura Bukit Mangkol ini dikelola dari tahun 2017-2018 dan telah disosialisasikan ke semua desa di seputaran Tahura Bukit Mangkol namun pada tahun berikutnya sosialisasi resmi itu harus berhenti karena keterbatasan anggaran, namun walaupun tidak ada sosialisasi resmi maka dari itu kami selaku pengelola dari Tahura melakukan inisiatif sendiri dengan melaksanakan sosialisasi yang tidak resmi atau sosialisasi mandiri”*

Berdasarkan wawancara dari Ibu Lintas pada tanggal 24 Mei 2023 bahwa kegiatan seperti sosialisasi terkendala karena anggaran. Anggaran memang merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam melaksanakan segala sesuatu kegiatan. Jika anggaran sudah sesuai dan cukup maka, segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan dengan baik dan oleh karena itu sumber dari anggaran dan manajemen dalam mengelola segala sesuatu harus sangat diperhitungkan dengan matang.

Menurut Penulis berdasarkan pernyataan dari Ibu Lintas mengenai kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat belum optimal karena kendala anggaran. Seharusnya, dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah harus mempersiapkan secara matang dalam melakukan pengelolaan serta perlindungan salah satunya adalah menyiapkan anggaran untuk menunjang keoptimalan dari Tahura Bukit Mangkol baik itu dalam Pengelolaan dan Perlindungan. Meskipun masih ada sosialisasi mandiri yang dilakukan kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut sudah pasti akan tidak optimal.

1. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah Dalam Mencegah Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol
2. Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang fungsi dari Tahura

Lingkungan hidup yang baik dan sehat tercipta dari masyarakat yang sudah sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Apabila masyarakat sudah sadar tentang pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka kegiatan-kegiatan seperti kegiatan tanpa izin tidak akan terjadi lagi. Apabila masyarakat disekitar Tahura Bukit Mangkol atau masyarakat yang jauh sekalipun sadar terhadap pentingnya Tahura Bukit Mangkol dalam menunjang kehidupan sehari-hari ekosistem yang ada didalamnya maka kegiatan tanpa izin yang terjadi di Tahura Bukit Mangkol tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan bahwa pelaku dari kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol adalah masyarakat itu sendiri Sehingga dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup harus ekstralebih keras lagi dalam menggerakkan masyarakat agar lebih sadar kepada lingkungan sekitar yakni Tahura Bukit Mangkol. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah haruslah kegiatan yang dapat menunjang masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya Tahura Bukit Mangkol yaitu salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Tahura, terkait hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada tahura serta dapat juga memberikan muatan materi yang isinya mengenai tahura.

Kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat atau perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan Ketua RW namun berdasarkan wawancara dari Ibu Lintas bahwa kegiatan seperti ini sudah pernah dilakukan tetapi kegiatan tersebut harus berhenti karena kendala anggaran.

Berikut merupakan beberapa wawancara yang Penulis lakukan kepada masyarakat pada tanggal 21 Juni, 24 Juni, 29 Juni, 5 Juli 2023 mengenai apa itu Tahura, siapa yang mengelola Tahura dan apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Umur | Alamat |
| 1 | Misudario | 57 Tahun | Desa Terak |
| 2 | Juri | 47 Tahun | Desa Terak |
| 3 | Nova | 31 Tahun | Desa Mangkol |
| 4 | Suhartika | 35 Tahun | Desa Pedindang |
| 5 | Tobing | 25 Tahun | Desa Pedindang |
| 6 | Rio | 27 Tahun | Desa Terak |
| 7 | Aswariansyah | 35 Tahun | Desa Kelurahan Dul |
| 8 | Syamsiar | 49 Tahun | Desa Kelurahan Dul |

Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan kepada masyarakat, ditemukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya tahu apa itu Tahura dan Fungsinya apa, siapa yang mengelola, dan apakah sudah ada kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan di desa mereka. Bapak Misudario selaku ketua RT 02 Desa Terak juga belum terlalu mengetahui apa itu Tahura meskipun dalam sesi tanya mengenai siapa yang mengelola Tahura beliau menjawabnya dengan terbata-bata atau tidak spesifik menjawab bahwa yang mengelola Tahura Bukit Mangkol adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, kemudian dalam pertanyaan ketiga mengenai apakah sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, beliau menjawab sudah pernah, namun sudah lama tidak laksanakan lagi kegiatan sosialisasi di desa mereka. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Lintas bahwa memang sosialisasi resmi sudah lama tidak dilaksanakan di desa sekitar Tahura Bukit Mangkol.

Menurut Penulis dalam hal ini memang pihak Dinas Lingkungan Hidup harus esktra dalam menggerakkan masyarakat agar sadar terhadap lingkungan sekitar dan oleh sebab itu program-program yang dilaksanakan haruslah program yang bermanfaat dan tepat sasaran. Jika program tersebut tepat sasaran maka masyarakat juga akan sadar terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan seperti sosialisasi juga harus terus di laksanakan karena memang program seperti sosialisasi ini sangatlah penting bagi masyarakat agar masyarakat sadar terhadap lingkungan sekitar. Di sisi lain Masyarakat juga harus menanamkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan dari lubuk hatinya bahkan sikap dan tanggung jawab ini haruslah ditanamkan sejak dini karena untuk mencipatakan suatu lingkungan hidup yang bersih dan sehat maka diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat.

1. Sarana prasarana dalam pengamanan belum optimal

Sarana prasarana merupakan unsur pendukung dalam kesuksesan suatu kegiatan. Perihal pengamanan di Tahura Bukit Mangkol, sarana prasarananya kurang memadai. Hal ini sesuai dengan yang telah di sampaikan oleh Ibu Lintas selaku Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam pada tanggal 2 Juni 2023 ia mengatakan:

*“Sarana prasarana yang ada di Tahura Bukit Mangkol belum bisa dikatakan optimal atau kurang memadai. Sebab dari belum optimalnya sarana prasarana karena keterbatasan anggaran. Terutama dalam proses pengamanan, sarana prasarananya masih belum optimal”*

Berikut merupakan sarana prasarana yang ada di Tahura Bukit Mangkol dalam proses pencegahan dan pengamanan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Barang | Buah |
| 1. | Mobil Patroli | 1 |
| 2. | Motor Patroli | 7 |
| 3. | Gps | 6 |

Berjalan lancar atau tidaknya suatu pengamanan dalam Tahura Bukit Mangkol dilihat dari sarana prasaranannya karena, sarana prasarana adalah unsur pendukung. Menurut Penulis dengan Melihat sarana prasarana dalam proses pengamanan sesuai yang disampaikan oleh Ibu Lintas masih terbilang kurang memadai. Seharusnya, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sendiri harus memaksimalkan sarana prasarananya. Segala anggaran untuk menunjang keoptimalan dari segala kegiatan di Tahura Bukit Mangkol harus disiapkan dengan matang.

1. Tidak terdapat Polisi Hutan

Polisi Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkup dan berada dibawah naungan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang kemudian diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara menyeluruh oleh pusat yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan hasil hutan (Sukir, 2021: 43).

Pengertian mengenai Polisi Kehutanan ini dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yang berbunyi:

“Polisi Kehutanan merupakan Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang atas kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”

Sesuai dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan reformasi birokrasi) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya juga dijabarkan mengenai pengertian dari Polisi Kehutanan yaitu: Polisi Hutan biasa disebut juga dengan jagawana yang merupakan pegawai dalam lingkungan instansi kehutanan yang fungsi dan sifat kerjanya melakukan kegiatan terkait perlindungan atas kawasan hutan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang sebagai polisi khusus yang membidangi Kehutanan dan seluruh yang berkaitan dengan kehutanan hayati dan ekosistem dan sumber daya alamnya (Sukir, 2021 : 43).

Fungsi dan tugas dari Polisi Hutan ialah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan dan sesuai Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka kreditnya yang berbunyi:

“Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan”

Betapa pentingnya kehadiran Polisi Kehutanan dalam melakukan pengamanan hutan maka sudah semestinya Polisi Hutan harus ada di setiap hutan salah satunya adalah pada Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah. Namun faktanya Polisi Hutan belum ada pada Tahura Bukit Mangkol meskipun sebelumnya ada kemudian karena isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pada bagian pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan pada sub urusan Pendidikan dan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan bahwa urusan di bidang tersebut daerah kabupaten atau kota tidak menerima bagian. Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan Ibu Lintas selaku Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam pada tanggal 2 Juni 2023 mengatakan:

*“sebenarnya dulu di Tahura Bukit Mangkol punya 3 Polhut namun karena isi dari UU NO 23 Tahun 2014 itu yang menarik ASN PNS Fungsional yaitu Polhut dan Penyuluh Kehutanan ke Pemrintahan Provinsi maka saat ini di Tahura hanya ada Tenaga Pengamanan Hutan.*

Inilah yang menyebabkan tidak adanya Polisi Hutan pada Tahura Bukit Mangkol sehingga menurut Penulis, apabila Polisi Hutan tidak ada di Tahura Bukit Mangkol karena isi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 akan tetapi, di Tahura Bukit Mangkol masih ada Tenaga Pengamanan Hutan. Adanya tenaga Pengamanan Hutan haruslah dimanfaatkan secara optimal dengan cara melakukan penambahan anggota dari Tenaga Pengamanan Tahura karena, jika hanya ada 8 tenaga pengamanan tahura kemudian dibandingkan dengan luasnya Tahura Bukit Mangkol ini maka pengamanan Kawasan Tahura Bukit Mangkol sudah dipastikan tidak akan optimal sehingga mempengaruhi keberlangsungan dari Tahura itu sendiri.

Tahura Bukit Mangkol yang bersih, aman, sehat, dan indah dapat dicapai apabila kegiatan-kegiatan seperti pengamanan ini berlangsung secara optimal. Sebagai pemangku dari kawasan Tahura Bukit Mangkol sudah seharusnya melakukan evaluasi terkait apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki, dan apa saja yang harus dioptimalkan. Jika hal tersebut telah dilakukan secara optimal dengan melihat aspek kemanfaatan dan aspek keberhasilan maka sudah dipastikan segala suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah akan berjalan baik.

1. Belum memiliki kantor/pos pengelolaan Tahura yang berada di sekitar kawasan Tahura

Kantor atau pos Tahura Bukit Mangkol sudah seharusnya dekat dengan lokasi Tahura itu sendiri karena, apabila ada suatu kegiatan tanpa izin yang terjadi di kawasan Tahura Bukit Mangkol maka akan memudahkan dalam proses penindakannya dan penindakan akan cepat terlaksana. Jika kantor atau pos Tahura terletak jauh sekitar 60 km dari Tahura itu sendiri maka penindakan akan sangat lambat karena faktor dari jarak yang cukup jauh. Belum adanya kantor atau pos Tahura yang berada di sekitar kawasan Tahura Bukit Mangkol dikarenakan beberapa sebab diantara lain:

1. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi pusatnya adalah di Kabupaten Bangka Tengah maka dari itu pengelolaan dari Tahura Bukit Mangkol jatuh kepada Pemda Bangka Tengah dan otomatis kantor atau pos pengelolaan Tahura Bukit Mangkol ada di Kabupaten Bangka Tengah yang jauh dari lokasi Tahura Bukit Mangkol.
2. Belum adanya UPT sehingga tidak bisa membentuk Kantor/pos di kawasan Tahura Bukit Mangkol
3. Pembentukan UPT terhambat karena bertentangan isi dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyatakan bahwa suatu wilayah tidak bisa dibentuk UPT apabila wilayah tersebut hanya berada pada 1 wilayah saja seperti Tahura Bukit Mangkol yang berada pada Kabupaten Bangka Tengah. Kecuali telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Ibu Lintas mengatakan dalam sesi wawancara yang Penulis lakukan pada tanggal 2 Juni 2023 bahwa apabila Tahura ini berada pada 2 wilayah seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Kota Pangkalpinang maka barulah bisa dibentuk UPT yang nantinya akan menjadi UPT Pangkalpinang dan UPT Bangka Tengah namun apabila hanya pada satu wilayah saja dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) maka tidak bisa dibentuk, hal ini sesuai dengan wawancara yang telah disampaikan oleh Ibu Lintas pada tanggal 2 Juni 2023 selaku Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam:

*“sebenarnya usulan pembentukan kantor UPT Tahura sudah pernah dilakukan namun pembentukan UPT tersebut terhambat karena bertentangan dengan isi dari Permendagri No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah”*

Menurut Penulis terkait kantor atau pos yang jauh dari Tahura Bukit Mangkol akan lebih baik apabila kantor atau Pos terletak dekat dari kawasan Tahura Bukit Mangkol karena ini akan memudahkan Tim Pengamanan Tahura dalam melakukan pengawasan demi menurunkan angka kegiatan tanpa izin yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Walaupun belum adanya kantor atau pos yang dekat dari Tahura dikarenakan alasan-alasan yang kemudian menghambat pembentukan Kantor atau pos tersebut namun, akan lebih baik apabila pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sebagai pemangku kawasan mencari solusi agar kantor atau pos yang didekat Tahura dapat dibentuk atau mungkin dapat mencari solusi-solusi lain demi menunjang Tahura Bukit Mangkol yang aman dari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan Tahura itu sendiri.

# 

# BAB IV

# PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah penting dilaksanakan dalam mencegah kegiatan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemangku wawasan dari Taman Hutan Raya Bukit Mangkol memiliki beberapa kegiatan yang dinamakan sebagai kegiatan Pengamanan hutan dan terdiri dari beberapa kegiatan didalamnya yaitu: patroli rutin, menerima pengaduan dari masyarakat atas kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol, mendata pengguna kawasan yang menempati Tahura Bukit Mangkol, sosialisasi kepada masyarakat.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan pencegahan terhadap kegiatan tanpa izin di Kawasan Tahura Bukit Mangkol memiliki beberapa Kendala yaitu terdiri dari: masyarakat belum mengetahui fungsi dari Tahura, sarana prasarana dalam pengamanan belum optimal, tidak terdapat polisi hutan, belum memiliki kantor atau pos pengelolaan Tahura yang berada di kawasan Tahura.
4. Saran
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam perannya sebagai pemangku Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol haruslah lebih baik lagi dan dimaksimalkan kegiatan pengamanan hutan

yang didalamnya terdiri dari beberapa kegiatan seperti patroli rutin yang harus dilaksanakan dengan rutin, penerimaan aduan dari masyarakat atas kegiatan tanpa izin yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol haruslah berjalan dengan terstruktur dan masyarakat yang memberikan aduan juga harus diberikan apresiasi yaitu seperti diberikan hadiah dan lain sebagainya, mendata pengguna kawasan yang menempati Tahura Bukit Mangkol juga harus dilakukan secara rutin dan jelas setiap tahunnya agar terhindar dari masyarakat yang semena-mena dalam penggunaan lahan karena lahan mereka berada pada Tahura Bukit Mangkol dan otomatis mereka harus mengikuti segala aturan yang berlaku, sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh desa yang berada di sekitar Tahura Bukit Mangkol dan kegiatan sosialisasi ini harus dilakukan setiap tahun agar masyarakat dapat paham bahwa Tahura itu apa dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Tahura itu seperti apa.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah seharusnya lebih cepat tanggap, memperhitungkan dengan matang mengenai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta anggaran yang harus di keluarkan dalam melaksanakan pencegahan terhadap kegiatan tanpa izin di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol seperti mengadakan sosialisasi rutin secara resmi yang mengundang seluruh elemen masyarakat atau perwakilan dari tokoh masyarakat dengan menjelaskan materi mengenai Tahura, meningkatkan sarana prasarana dalam pengamanan agar proses pengamanan dapat berjalan dengan lancar, mengoptimalkan tenaga pengaman hutan dengan cara meningkatan sumber daya manusia dari tenaga pengamanan hutan, membentuk kantor atau pos yang dekat dengan Tahura Bukit Mangkol agar proses pengamanan akan lebih optimal.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Abdul Kadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Aprita, Khalisah Hayatuddin dan Serlika. 2021. *HUKUM LINGKUNGAN*. Pertama. Jakarta: KENCANA.

Badrudin. 2015. *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta. [http://digilib.uinsgd.ac.id/4002/1/DASAR - DASAR MANAJEMEN.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/4002/1/DASAR%20-%20DASAR%20MANAJEMEN.pdf).

Bakir, R. Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tanggerang: Karisma Publishing Group.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Vol. 13. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Handoko, Hani T. 2015. *Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Makarao, Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik. 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Vol. 21. Jakarta: KENCANA. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203.

Muchsan, S. H. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Rohayatin, Titin. 2021. *Dasar Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta,Sleman: DEEPUBLISH.

Sunggono, Bambang. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerdjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama.

Yustisia Rahman, Citra Hartati, Muhammad Maulana, Henri Subagiyo, R. Alam Surya Putra. 2013. *Indeks Kelola Hutan Dan Lahan Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di Indonesia*. Prayekti Murharjanti.

Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.

1. **Jurnal**

Alinda, S.N, Setiawan A.Y.& Sudrajat, A. 2021. “Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.” *Jurnal Geografi Geoarea*, 93.

Adawiah, Rabiah Al. 2015. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1 (2): 288. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26.

Budiman, Shahril, Diah Siti Utari, and Noora Fazira. 2019. “Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup Di Pemerintah Daerah ( Studi Tentang Pengawasan Mangrove Di Kota Tanjungpinang )” 04 (3): 119–25.

Glendoh, Sentot Harman. 2000. “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi.” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 2: 45–46.

Herlina, Nina. 2015. “PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. \*) ABSTRAK.” *Unigal.Ac.Id* 3 (2): 2.

Listyani, Nurul, and Muzahid Akbar Hayat Subianta Mandala. 2018. “Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam.” *Jurnal Media Hukum* 25 (2): 224. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227.

Purwadi. 2017. “Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda The Effect of Direct and Indirect Monitoring on Employee Effectiveness in Public Works Department A.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman* 14 (2): 188.

Sensu, La. 2010. “Strategi Pengelolaan Kerusakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Nipa-Nipa Di Kota Kendari.” *Jurnal Kehutanan* 2 (1): 6.

Serlinta Bangun, Ashabul Anhar, Ryan Moulana. 2020. “Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara” 5 (November): 179.

Veggy Shintya Putri, Ibrahim dan Luna Febriani. 2021. “PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL” 1: 491–98.

Zefri, Meita Sekar Sari & Muhammad. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21: 311.

Maisyaroh, Wiwin. 2010. “Struktur Komunitas Tumbuhan Penutup Tanah Di Taman Hutan Raya R . Soerjo Cangar, Malang.” *Pembangunan Dan ALam Lestari* 1 (1): 1–9.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Surat ketetapan Nomor SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1. **Skripsi dan Tesis**

Aini, Sri Nur. 2021. “STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA ORANG KAYO HITAM PROVINSI JAMBI.” SUlthan Thaha Saifuddin.

Barik, Muhammad. 2022. “KENDALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Chrestella Hana Griselda. 2019. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG SEI ULU LAJAI YANG DI JADIKAN KAVLING SIAP BANGUN (KSB) OLEH PT. PRIMA MAKMUR BATAM DI KOTA BATAM.” UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Hidayah, Syarik. 2019. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.” Universitas Bangka Belitung.

Sely, Anastasia Cindy. 2021. “Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.” Universitas Hasannudin.

Silvi, Ferina Widyawati Ayu. 2021. “Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengawasan Dan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Upaya Menjamin Hak Privasi Warga Negara Indonesia.” Universitas Ahmad Dahlan.

Susanto, Steven Dherry. 2021. “Penegakan Hukum Pidana Terhadapa Pelaku Pembakalan Liar (Ilegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau.” Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. **Website**

SudutHukum.com. (2017). Pengertian Pencegahan. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023 dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>

Konspirasikeadilan.id (2022). ILEGAL.Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023 dari <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807#:~:text=Ilegal%20Adalah%20Suatu%20tindakan%20%2F%20perbuatan,dengan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku>.

**Data Kualitatif Transkrip Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah Rabu 24 Mei dan Jumat 2 Juni 2023**

1. Apa Saja Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam mencegah terjadinya kegiatan tanpa izin yang terjadi pada Tahura Bukit Mangkol ?

* “Peran kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pencegahan kegiatan tanpa izin adalah dengan melakukan program yang bernama program pengamanan kawasan Tahura yang terdiri dari beberapa kegiatan yakni: patroli rutin, mendata pengguna yang menempati Kawasan Tahura Bukit Mangkol, menerima aduan dari Masyarakat terkait kegiatan tanpa izin yang terjadi di Tahura Bukit Mangkol dan sosialisasi kepada Masyarakat”.

1. Kegiatan tanpa izin apa saja yang paling banyak terjadi di Tahura Bukit Mangkol ?

* “Yang paling banyak atau yang paling sering terjadi kegiatan tanpa izin diantara pertambangan timah, *Ilegall Logging,* dan pembukaan lahan adalah petambangan timah dengan jenis tambangnya adalah tambang timah tungau”.

1. Apakah benar bahwa di Tahura Bukit Mangkol ini belum terdapat polisi hutan sehingga apabila terjadinya kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah kesulitan dalam penindakannya ?

* “Benar bahwa disini memang tidak ada Polisi Hutan maka dari itu dalam proses penindakan kami kesulitan, maka dari itu apabila kami menemukan adanya kegiatan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sesuai dengan aduan dari masyarakat maka kami akan mengerahkan tenaga pengamanan hutan untuk mengecek dan memperingatkan bahwa di kawasan Tahura Bukit Mangkol tidak boleh ada kegiatan tanpa izin disini, namun apabila si pelaku tanpa izin itu masih melakukan kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol padahal sudah diperingati berulang-ulang maka kami akan mengadukan masalah ini kepada Pihak Kepolisian dan Pihak Gakkum sebagai instansi yang berwenang dalam penegakan hukum”.

1. Kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam mencegah terjadinya kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol ?

* “Kendala kami dalam mencegah terjadinya kegiatan tanpa izin di Tahura Bukit Mangkol adalah sebagian masyarakat belum mengetahui tentang fungsi dari Tahura, sarana prasarana dalam pengamanan belum optimal, tidak terdapat Polisi Hutan, belum memiliki kantor/pos pengelolaan Tahura yang berada di sekitar kawasan Tahura”

1. Apakah sudah ada terlaksana kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai Tahura Bukit Mangkol ?

* “Sudah pada tahun 2017-2018 namun pada tahun berikuntya terhenti karena keterbatasan anggaran tetapi walaupun tidak ada sosialisasi secara resmi kami tetap melakukan sosialisasi mandiri kepada masyarakat”.

1. Bagaimana sarana prasarana dari Tahura Bukit Mangkol, apakah sudah berjalan optimal atau tidak ?

* “Sarana Prasarana yang ada di Tahura Bukit Mangkol belum bisa dikatakan optimal dan alasan utamanya ada dalam anggaran”.

1. Tahura bukit Mangkol dikelilingi oleh beberapa desa ?

* “Tahura ini dikelilingi oleh 11 Desa diantara lain adalah: Desa Terak, Desa Pedindang, Desa Mangkol, Desa Kelurahan Dul, Desa Beluluk, Desa Jeruk, Desa Air Mesu, Desa Cambai Selatan, Desa Puput, Desa Simpang Katis Beruas, Desa Teru”.

1. Patroli Rutin dilaksanakan seminggu berapa kali ?

* “Patroli Rutin sebenarnya dilaksanakan setiap hari, namun karena jumlahnya cuman 8 orang dan apabila ada kegiatan seperti pendataan, inventarisasi, penyuluhan maka tim Pengamanan Hutan ini akan ditarik untuk membantu dalam kegiatan tersebut sehingga Patroli rutin terkendala karena sebagian atau mungkin saja semua Pamhut ditarik untuk membantu dalam kegiatan tersebut sehingga Patroli rutinnya tidak berjalan dengan maksimal”.

1. Berapa banyak masyarakat yang menempati Tahura Bukit Mangkol ?

* “ masyarakat yang menempati Tahura Bukit Mangkol cukup banyak dan rata-rata mereka adalah pengguna lahan sebelum Tahura Bukit Mangkol ini ditetapkan sebagai Tahura. Dan dalam pendataannya kami sudah menjalankan pendataan dari tahun 2017-2019 terkait siapa saja yang memiliki lahan dalam kawasan Tahura Bukit Mangkol dan mereka kami tempati di Blok Tradisional”.

1. Berapa banyak sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam proses pencegahan kegiatan tanpa izin yang ada di Tahura Bukit Mangkol dan apakah sudah optimal atau tidak ?

* “Sarana Prasarana dalam pencegahan belum bisa dikatakan optimal karena kami hanya memiliki 1 mobil patroli, 7 motor patroli, dan 6 Gps “.

1. Kenapa belum memiliki kantor atau pos pengamanan dan pengelolaan yang berada disekitar kawasanTahura Bukit Mangkol ?

* “Pada dasarnya seluruh kegiatan pengelolaan/ administrasinya ada di 1 Kabupaten yakni Pemda Bangka Tengah tepatnya di kantor Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah, dan sebelum itu kami juga sudah mengusulkan untuk dIbuat kantor UPT di sekitaran Kawasan Tahura namun itu terkendala karena isi dari Permendagri 12”.

1. Daerah mana saja yang telah disosialisasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah ?

* “Dalam hal ini, sudah semua desa yang berada mengelilingi Tahura Bukit Mangkol kami sosialisasikan pada tahun 2017-2018 waktu itu. Namun untuk tahun selanjutnya kami hanya melakukan sosialisasi mandiri”.

**Data Kualitatif Transkrip Wawancara Masyarakat Rabu 21 Juni, Jumat 24 Juni, Kamis 29 Juni, Rabu 5 Juli 2023**

1. Apa itu Tahura dan Fungsinya apa ?

* Misudario
* “Kurang tahu”
* Juri
* “tidak tahu”
* Nova
* “Saya tidak tahu”
* Suhartika
* “Tidak tahu”
* Tobing
* “Tidak tahu”
* Rio
* “Tidak tahu”
* Aswariansyah
* “Tidak tahu”
* Syamsiar
* “Tidak tahu”

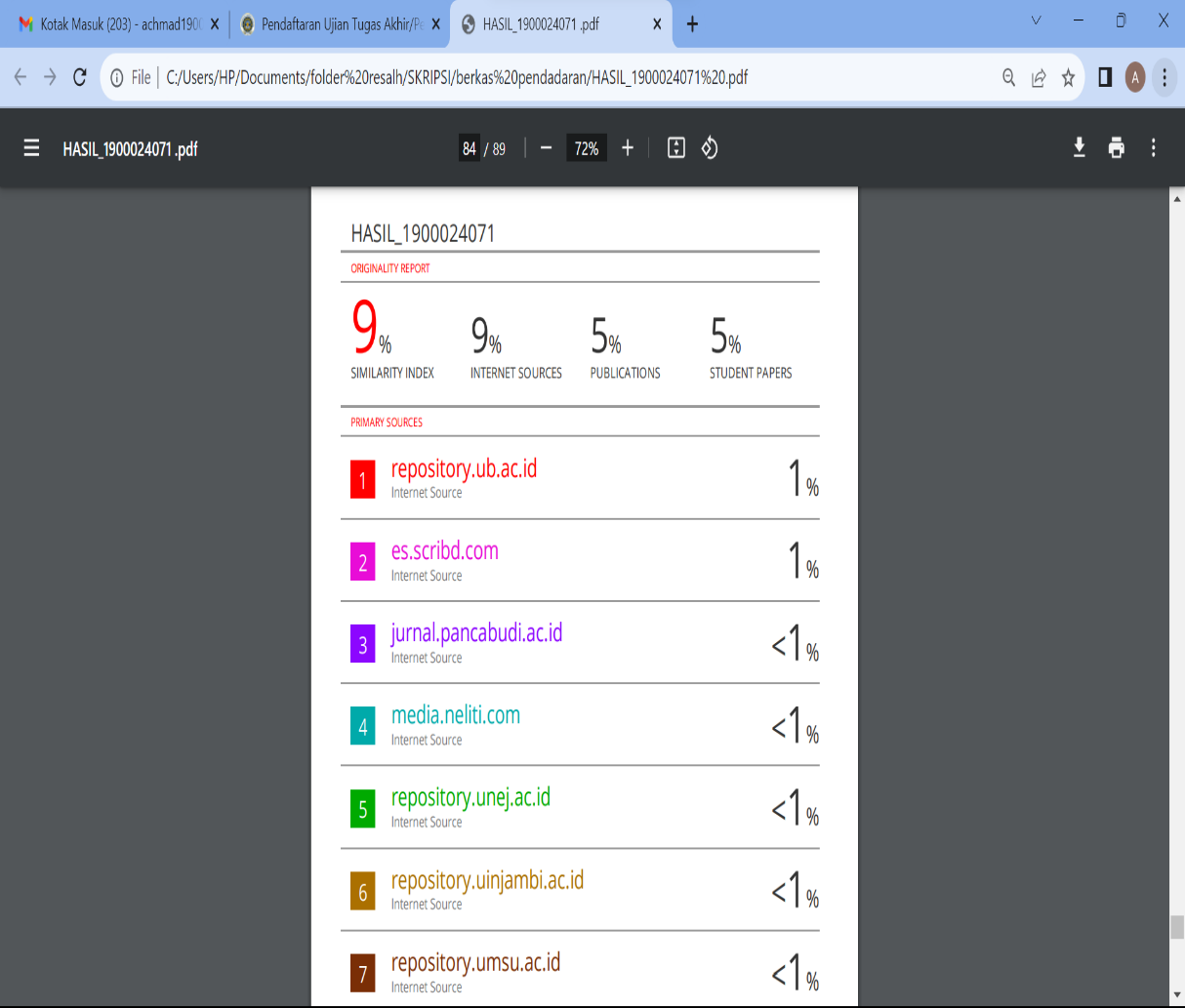
1. Siapa yang mengelola Tahura Bukit Mangkol ?

* Misudario
* “ Pihak DLH, terkait lebih spesifiknya saya juga belum terlalu tahu, DLH mana yang mengelolanya, mungkin saja DLH Koba karena Tahura Bukit Mangkol masih masuk pada wilayah Koba”
* Juri
* “Iya saya juga kurang tahu, mungkin pihak DLH Pangkalpinang
* Nova
* “Saya tidak tahu”
* Suhartika
* “sepertinya pemerintah Koba”
* Tobing
* “Kurang tahu”
* Rio
* “Kayaknya Pemerintah Koba”
* Aswariansyah
* “Yang pasti pemerintah”
* Syamsiar
* “Tidak Tahu”

1. Apakah sebelumnya telah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah selaku pemangku kawasan ?

* Misudario
* “ Untuk kegiatan seperti sosialisasi dulunya pernah di desa kami, tapi untuk sekarang tidak pernah ada lagi”
* Juri
* “Iya dulunya ada tapi sekarang tidak ada lagi, waktunya pun sudah lama, saya lupa tahun berapa”
* Nova
* “kurang tahu saya”
* Suhartika
* “Iya dulunya sempet ada, tapi sekarang tidak ada lagi”
* Tobing
* “Kurang tahu”
* Rio
* “Kurang tahu”
* Aswariansyah
* “Kurang tau”
* Syamsiar
* “Tidak tahu

**LAMPIRAN**

























**







